

KLIPING BERITA MEDIA MASSA



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas, Hal. 14	Senin, 16 September 2019	Bendungan dan Pengalihan Tol untuk Ibu Kota Baru	Pembangunan Sembilan bendungan pada 2019 direncanakan akan dimulai pada akhir tahun.
2	Kompas, Hal. C	Sabtu, 14 September 2019	Tampungan Angan pada Bendungan Pertama	Bendungan Ladongi akan menjadi bendungan pertama di Benua Anoa, Sulawesi Tenggara. Bendungan dengan daya tampung 45 juta meter kubik ini diharapkan menjaga ketahanan pangan. Sumber tenaga listrik.
3	Kompas, Hal. 14	Sabtu, 14 September 2019	Transparansi untuk Lindungi Konsumen	Perlindungan konsumen dalam jual beli property diharapkan tidak berhenti pada aturan, namun juga diimplementasikan di lapangan.
4	Bisnis Indonesia, Hal. 9	Sabtu, 14 September 2019	Tol Pemutar Roda Ekonomi	Dalam jangka pendek, pengoperasian jalan tol akan langsung berdampak pada transportasi, logistic dan akomodasi
5	Bisnis Indonesia, Hal. 10	Sabtu, 14 September 2019	Sejuta Rumah Masih Sesuai Target	Kementerian PUPR menyatakan realisasi Program Sejuta Rumah bulan ini telah mencapai 894.000 unit atau 71,52% dari target 1,25 juta unit
6	Bisnis Indonesia, Hal. 7	Senin, 16 September 2019	2 PPJ RUas Tol Diamandemen	Perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Kunciran-Serpong dan Semanan-Sunter baru dilakukan amendemen terkait pengembalian dana talangan
7	Bisnis Indonesia, Hal. 9	Senin, 16 September 2019	Pembebasan Lahan DIpercepat	Pembebasan lahan ruas tol Manado-Bitung disebut dengan mempercepat pembayaran ganti rugi
8	Bisnis Indonesia, Hal. 23	Senin, 16 September 2019	Investor Asing Mulai Incar Hunian MBR	Pasar perumahan yang besar di Indonesia telah mendorong pengusaha luar negeri menyediakan MBR
9	Koran Tempo, Hal. Metro 1	Senin, 16 September 2019	Kota Bekasi Waspada Ledakan Jumlah Penduduk	Dari tingginya jumlah angka urbanisasi
10	Koran Tempo, Hal. Metro 3	Senin, 16 September 2019	TNI Dilibatkan dalam Pengelolaan Sungai di Jabotabek	Pemerintah akan mengelola sungai yang melintasi kawasan ibukota

Judul	Bendungan dan Pengalihan Tol untuk Ibu Kota Baru	Tanggal	Senin, 16 September 2019
Media	Kompas, Hal. 14		
Resume	Pembangunan Sembilan bendungan pada 2019 direncanakan akan dimulai pada akhir tahun.		

INFRASTRUKTUR

Bendungan dan Pengalihan Tol untuk Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS – Pembangunan sembilan bendungan pada 2019 direncanakan akan dimulai pada akhir tahun. Salah satu bendungan tersebut akan mendukung pasokan air untuk ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ni Made Sumarsih, akhir pekan lalu, menyampa-

kan, rencana pembangunan sembilan bendungan itu masih dimatangkan karena ada sejumlah perubahan.

“Saat ini sedang dalam pembahasan sertifikasi oleh Komisi Keamanan Bendungan (KKKB) beserta anggarannya,” kata Sumarsih.

Sumarsih memastikan, lima dari sembilan bendungan yang akan dibangun itu adalah

fragnetung di Jawa Tengah, Amroto di Sulawesi Tenggara, Tiur Suntut di Nusa Tenggara Barat, Mbay di Nusa Tenggara Timur, dan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur.

Adapun empat bendungan selebihnya masih tentatif. Terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, pemerintah berencana membangun Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara

untuk mendukung pasokan air bersih. Proses lelang untuk kajian desain dan sertifikasi Bendungan Sepaku Semoi telah selesai dilakukan Kementerian PUPR.

Jalan tol

Secara terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Partikesit menyampaikan, pengalihan pembangunan seksi I dan seksi V Jalan Tol

Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur sepanjang 33 kilometer masih dibahas. Konstruksi kedua seksi jalan tol yang akan mendukung Ibu kota negara baru tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurut Danang, pengalihan konstruksi ke PT Jamsata dan PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda akan menambah biaya investasi. (NAD)

Judul	Tampungan Angan pada Bendungan Pertama	Tanggal	Sabtu, 14 September 2019
Media	Kompas, Hal. C		
Resume	Bendungan Ladongi akan menjadi bendungan pertama di Benua Anoa, Sulawesi Tenggara. Bendungan dengan daya tampung 45 juta meter kubik ini diharapkan menjaga ketahanan pangan. Sumber reaga listrik.		

TAMPUNGAN ANGAN PADA BENDUNGAN PERTAMA



sete bak. Tahun ini baru kali ini menemani," ucapnya. Hasilnya, tiga tahun setelah bendungan besar sedang dibangun, di sini sudah ada bendungan yang siap untuk beroperasi. "Mudah-mudahan bisa sampai tiga kali tahun nanti."

Tiga bendungan

Bendungan Ladongi, dengan daya tampung 45 juta meter kubik, memang sedang dalam pembangunannya. Lokasi bendungan ini berjarak sekitar 7 kilometer dari arah Sumera dan Hatjaja. Pengaliran air akan mencapai 20 persen untuk tahap pertama. Bendungan ini diharapkan selesai pada November 2020.

Agung Permana, Pejabat Pembuat Keputusan Bendungan Ladongi Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, menjelaskan, tahap pertama pembangunan Bendungan Ladongi mencapai 70 persen, lebih cepat 4 persen daripada target awal ini. Bendungan pertama di Sultra ini segera memasuki tahap kedua.

"Nilai total bangunan Rp 1,1 triliun. Memang ada penambahan Rp 200 miliar dari rencana awal Rp 900 miliar karena dipengaruhinya kondisi bahan yang ada. Untuk pengerjaan betonnya sendiri mencapai 300 meter saja terjadi 11 kali inspeksi. Butuh perlakuan khusus untuk pengerjaan di lapangan sehingga bisa mendapatkan," ujar Agung, Rabu (4/9/2019).

Bendungan Ladongi merupakan pembangunan dari Bendungan Ladongi yang lebih awal lebih dari 20 tahun lalu. Bendungan Ladongi yang memiliki daya tampung ribuan hektar, telah mencapai penyelesaian sekitar 2212 hektar.

Saat ini, Bendungan Ladongi memiliki luas tampungan 2212 hektar. Selain itu, bendungan juga bermanfaat sebagai pengendali banjir, lahan air baku, dan pembangkit listrik mikrohidro.

Air baku bendungan yang mencapai 912 meter kubik per detik bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan di tiga kecamatan. Selain itu, juga ada rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang bisa menghasilkan daya hingga 1,1 megawatt.

"Harapnya bisa tambah sampai awal 2020 hektar, tetapi lahannya belum ada. Dan yang perlu diingat juga bahwa produksi padi bisa meningkat dengan masa tanam bertahap," katanya. "Sementara bisa tambah sampai awal 2020 hektar, tetapi lahannya belum ada. Dan yang perlu diingat juga bahwa produksi padi bisa meningkat dengan masa tanam bertahap," katanya.

"Sementara bisa tambah sampai awal 2020 hektar, tetapi lahannya belum ada. Dan yang perlu diingat juga bahwa produksi padi bisa meningkat dengan masa tanam bertahap," katanya.

"Sementara bisa tambah sampai awal 2020 hektar, tetapi lahannya belum ada. Dan yang perlu diingat juga bahwa produksi padi bisa meningkat dengan masa tanam bertahap," katanya.

"Sementara bisa tambah sampai awal 2020 hektar, tetapi lahannya belum ada. Dan yang perlu diingat juga bahwa produksi padi bisa meningkat dengan masa tanam bertahap," katanya.

"Sementara bisa tambah sampai awal 2020 hektar, tetapi lahannya belum ada. Dan yang perlu diingat juga bahwa produksi padi bisa meningkat dengan masa tanam bertahap," katanya.

"Sementara bisa tambah sampai awal 2020 hektar, tetapi lahannya belum ada. Dan yang perlu diingat juga bahwa produksi padi bisa meningkat dengan masa tanam bertahap," katanya.

"Sementara bisa tambah sampai awal 2020 hektar, tetapi lahannya belum ada. Dan yang perlu diingat juga bahwa produksi padi bisa meningkat dengan masa tanam bertahap," katanya.



penyempurnaan di sisi lain

Bernilai Rp 1,1 triliun, Bendungan Ladongi akan menjadi bendungan pertama di "Bumi Anoa", Sulawesi Tenggara. Bendungan dengan daya tampung 45 juta meter kubik ini diharapkan menjaga ketahanan pangan, sumber tenaga listrik, sekaligus percontohan untuk bendungan lain yang direncanakan dibangun.

SAIFULL RIZAL YUNUS

Harapan bisa sampai tiga kali lebih. Tapi, tentu saja, bendungan ini akan menjadi bendungan pertama di "Bumi Anoa", Sulawesi Tenggara. Bendungan dengan daya tampung 45 juta meter kubik ini diharapkan menjaga ketahanan pangan, sumber tenaga listrik, sekaligus percontohan untuk bendungan lain yang direncanakan dibangun.

Bendungan Ladongi merupakan bendungan pertama di Sulawesi Tenggara. Bendungan ini diharapkan menjaga ketahanan pangan, sumber tenaga listrik, sekaligus percontohan untuk bendungan lain yang direncanakan dibangun.

Bendungan Ladongi merupakan pembangunan dari Bendungan Ladongi yang lebih awal lebih dari 20 tahun lalu. Bendungan Ladongi yang memiliki daya tampung ribuan hektar, telah mencapai penyelesaian sekitar 2212 hektar. Saat ini, Bendungan Ladongi memiliki luas tampungan 2212 hektar. Selain itu, bendungan juga bermanfaat sebagai pengendali banjir, lahan air baku, dan pembangkit listrik mikrohidro. Air baku bendungan yang mencapai 912 meter kubik per detik bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan di tiga kecamatan. Selain itu, juga ada rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang bisa menghasilkan daya hingga 1,1 megawatt. "Harapnya bisa tambah sampai awal 2020 hektar, tetapi lahannya belum ada. Dan yang perlu diingat juga bahwa produksi padi bisa meningkat dengan masa tanam bertahap," katanya. "Sementara bisa tambah sampai awal 2020 hektar, tetapi lahannya belum ada. Dan yang perlu diingat juga bahwa produksi padi bisa meningkat dengan masa tanam bertahap," katanya.



- 1. Lokasi Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
- 2. Daya tampung 45 juta meter kubik
- 3. Anggaran pembangunan Rp 1,1 triliun
- 4. Target pembangunan tahap pertama: November 2020
- 5. Bendungan Ladongi merupakan pembangunan dari Bendungan Ladongi yang lebih awal lebih dari 20 tahun lalu
- 6. Pengerjaan lahan awal yang selesai hingga awal 2020 hektar mencapai 2212 hektar
- 7. Proyek pembangunan produksi padi dari 21.120 ton per tahun menjadi 64.000 ton per tahun

Pekerja berada di lokasi pembangunan Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, 2 September 2019. Pembangunan bendungan yang akan mencapai 45 juta meter kubik, mencapai 70 persen untuk tahap pertama. Bendungan pertama di Sultra ini diharapkan selesai pada November 2020.

Dua bendungan lainnya sedang dipergigakan untuk dibangun di Kabupaten Konawe, yaitu Bendungan Amarro dan Peloska. Bendungan Amarro memiliki volume tampungan total 52 juta meter kubik, sementara Peloska jauh lebih besar, yaitu lebih dari 800 juta meter kubik.

Marsudi Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kerdiri Hasmudin C Madih, Bendungan Amarro akan dibangun tahun ini, sementara Peloska di akhir 2020. Selain untuk perikanan, bendungan ini juga menjadi pengendali banjir mengingat keadaan air terus terjadi bertahun-tahun, sehingga untuk pembangkit listrik dan perikanan.

Meski begitu, banyak pihak yang mengemukakan untuk menguji benar-benar dampak dan manfaat dari bendungan yang akan dibangun. Sebab, membuat bendungan berarti mengalirkan air ke daerah lain yang tidak terdampak banjir.

"Yang harus dipikirkan adalah kawasan hulu di Sultra ini tidak terdampak, dengan pembuangan limbah untuk pertambangan, perkebunan, hingga perikanan harus sebagai aliran air dari hulu tidak bisa diprediksi. Kemungkinan terburuk harus diantisipasi," ucapnya.

Sebelum lagi terkait dengan Bendungan Peloska yang akan membuat sejumlah kecamatan terendam air. "Bendungan itu fungsi utamanya untuk pengaliran. Namun, jika lingkungan yang ada sekarang, misalnya, perkebunan, hingga perikanan harus sebagai aliran air dari hulu tidak bisa diprediksi. Kemungkinan terburuk harus diantisipasi," ucapnya.

Bendungan Amarro yang akan dibangun juga akan membuat sejumlah kecamatan terendam air. "Bendungan itu fungsi utamanya untuk pengaliran. Namun, jika lingkungan yang ada sekarang, misalnya, perkebunan, hingga perikanan harus sebagai aliran air dari hulu tidak bisa diprediksi. Kemungkinan terburuk harus diantisipasi," ucapnya.

Judul	Transparansi untuk Lindungi Konsumen	Tanggal	Sabtu, 14 September 2019
Media	Kompas, Hal. 14		
Resume	Perlindungan konsumen dalam jual beli property diharapkan tidak berhenti pada aturan, namun juga diimplementasikan di lapangan.		

PERUMAHAN

Transparansi untuk Lindungi Konsumen

JAKARTA, KOMPAS — Perlindungan konsumen dalam jual beli properti diharapkan tidak berhenti pada peraturan, tetapi diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, untuk menjalankannya, perlu pengawasan dan keterbukaan dari pemerintah daerah.

Rio Priambodo dari Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, Jumat (13/9/2019), berpendapat, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah, hak konsumen lebih terjamin.

"Permasalahannya selama ini adalah pengembang seperti berlindung di balik klausul PPJB yang lama. PPJB yang baru ini akan mengikat konsumen dengan pengembang. Konsumen perlu kejelasan dan kepastian karena sudah setor uang kepada pengembang," kata Rio.

Menurut Rio, keluhan atau

pengaduan masyarakat terkait proses jual beli properti selalu menempati lima besar terbanyak di YLKI. Keluhannya menyangkut proyek gagal bangun, mangkrak, dan aspek legalitas proyek yang bermasalah.

Contoh lain, konsumen ragu dengan kelanjutan proyek karena pembangunannya tidak jelas, sementara mereka tetap harus membayar angsuran. Jika dibatalkan, mereka akan mendapat sanksi pemotongan uang sampai 50 persen.

Pemerintah daerah diharapkan menunjuk secara jelas dinas yang berwenang dalam pengawasan. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan transparan kepada masyarakat tentang adanya pengembang yang wanprestasi. "Mestinya dinas setempat merilis data per tahun daftar pengembang yang diadukan konsumen," ujar Rio.

Menurut Marketing Director Paramount Land Alvin Andronicus, pada prinsipnya perjanjian jual beli rumah atau properti berdasarkan kepercayaan

dan komitmen. Konsumen percaya kepada pengembang, sementara pengembang berkomitmen membangun properti bagi konsumen. Dengan dasar itu, transaksi jual beli selama ini bisa dijalankan meskipun hanya berdasarkan desain proyek.

Menurut Alvin, aturan yang menjadi keberatan pengembang terkait dengan pembatalan dan jumlah denda yang dikenakan. Selama ini, denda/sanksi berupa pemotongan uang sampai 50 persen dari jumlah yang disetorkan karena pengembang telah menanggung biaya lain, seperti pajak penghasilan final, pajak pertambahan nilai, biaya kontraktor, dan biaya tim pembangunan.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Permen PUPR No 11/2019 tentang Sistem PPJB Rumah itu akan diikuti petunjuk teknis pelaksanaan. Penyusunan petunjuk teknis melibatkan Persatuan Pengembang Realestat Indonesia. (NAD)

Judul	Tol Pemutar Roda Ekonomi	Tanggal	Sabtu, 14 September 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 9		
Resume	Dalam jangka pendek, pengoperasian jalan tol akan langsung berdampak pada transportasi, logistic dan akomodasi		

► JELAJAH SUMATRA

Tol Pemutar Roda Ekonomi

“Bum, bum, bum”. Dentum alat berat yang menancapkan paku bumi ke dalam tanah menjadi pemecah kesunyian di Sungai Sodong, Kabupaten Mesuji.

Rivki Maulana & Ropesta Sitorus
redaksi@bisnis.com

Di proyek jalan tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung (Terpeka), para pekerja tampak sibuk menyelesaikan sisa pekerjaan dari jalan tol sepanjang 185 kilometer tersebut.

Pekerjaan konstruksi difokuskan pada segmen kecil sepanjang 100 meter, tak terpaut jauh dari Jembatan Kali Sodong. Tim Jelajah Infrastruktur Sumatra 2019 melintasi proyek jalan tol ini saat menuju Kayu Agung, Kamis (12/9). Jalan bebas hambatan ini dijadwalkan beroperasi pada Oktober 2019 mendatang dan siap menyandang status jalan tol terpanjang di Indonesia.

Jalan tol Terpeka merupakan lanjutan dari ruas Bakauheni—Terbanggi Besar (Bakter) yang sudah beroperasi sejak Maret 2019 lalu.

Tol Terpeka Yoni Satyo Wisnuwardhono mengatakan bahwa jalan tol bakal melebuhkan perekonomian di wilayah yang dilintas jalan bebas hambatan. Dia beralasan, jalan tol membuka daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau karena jalan akses yang tidak andal.

Sebagaimana diketahui, Jalan Lintas Sumatra selama ini menjadi andalan untuk arus barang dan penumpang di Sumatra Bagian Selatan. Namun, waktu tempuh saat ini

terbilang panjang. Perlu 12 jam dari Bakauheni—Palembang melalui jalan nasional, sedangkan lewat via jalan tol hanya 5 jam.

Dalam catatan *Bisnis*, Lampung dan Sumatra Selatan merupakan dua provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra. Laju pertumbuhan produk domestik bruto kedua provinsi ini pada semester I 2019 masing-masing 5,80% dan 5,62%. Angka itu cukup jauh dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatra sebesar 4,62%.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang tumbuh cukup signifikan selama paruh pertama 2019. Di Lampung, sektor usaha ini tumbuh 8% sedangkan di Sumsel tumbuh lebih tinggi, yakni 16%.

Para pelaku bisnis optimistis, roda perekonomian di Lampung dan Sumsel

► Dalam jangka pendek, pengoperasian jalan tol akan langsung berdampak pada sektor transportasi, logistik, dan akomodasi.

lain perusahaan komoditas sawit, batu bara, karet,” jelasnya kepada *Bisnis*.

Dia menuturkan, tren penjualan kendaraan di Sumatra Bagian Selatan mulai pulih dari tren pelemahan pada 2 tahun lalu. Dia menyebut, pada 2018, penjualan Isuzu Astra di Sumatra Bagian Selatan tumbuh sekitar 15%—20%. Saban bulan, penjualan *light truck* mencapai 30—40 unit. Isuzu, lanjutnya memegang pangsa penjualan truk ringan nomor dua di Sumbagsel.

Kalangan perbankan juga meyakini jalan tol bakal menjadi katalis bagi geliat perekonomian di Sumbagsel. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., misalnya memprediksi pertumbuhan kredit di Sumbagsel bisa mencapai 15%, lebih tinggi dari taksiran awal di kisaran 10%—11%.

Head of Performance and Channel Management Group Bank BNI Wilayah Palembang Yudi Indra mengatakan, keberadaan



bakal makin kencang bila jalan tol telah tersambung hingga Palembang. Dalam jangka pendek, pengoperasian jalan tol akan langsung berdampak pada

Dua jalan tol ini merupakan bagian dari megaprojek jalan tol Trans Sumatra yang dicanangkan sejak 2014 lalu. Pembangunan 24 ruas tol Trans Sumatra ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero).

Tim menjajal dua jalan tol Terpeka sebanyak dua kali. Pertama pada awal Mei 2019. Saat itu, jalan tol dari konstruksi jalan utama di segmen Terbanggi Besar—Pematang Panggang sudah terbangun. Adapun di segmen Pematang Panggang—Kayu Agung belum seluruhnya terbangun.

Namun, pada penjelajahan kedua, Kamis (12/9) lalu, konstruksi jalan tol sudah hampir sempurna. Bahkan, tempat istirahat dan pelayanan (TIP) di KM 215 A sudah siap digunakan dan tinggal menunggu pembukaan jalan tol Terpeka.

Jalan tol Terpeka merupakan simpul penting bagi konektivitas Bakauheni—Palembang yang diyakini bisa memangkas waktu tempuh perjalanan. Secara keseluruhan ada delapan kabupaten di dua provinsi yang dilintasi tiga ruas tol dari Bakauheni ke Palembang. Selain tol Terpeka dan tol Bakter, ada satu segmen dari ruas Kayu Agung—Palembang—Betung (Kapal Betung) yang akan jadi pelengkap.

Kepala Cabang Jalan

KOPI LAMPUNG

Yoni menyebut, kalangan pelaku usaha juga sudah mengincar peluang bisnis di TIP termasuk dari jaringan ritel nasional. Hal ini, lanjutnya mencerminkan prospek usaha yang menjanjikan dari keberadaan jalan tol.

“Sudah banyak peminat. Kalau pemerintah mau, bukan Starbucks, tapi kopi Lampung. Makanya kami juga merangkul pelaku usaha mikro kecil menengah dari desa-desa sekitar. Kami inginnya gerai di tempat ini nanti ada berbagai jenis tidak hanya makanan saja,” jelas Yoni.

sektor transportasi, logistik, dan akomodasi.

Part Head PT Astra International Tbk. Isuzu Cabang Palembang Bonafisius Kristianto mengatakan penjualan kendaraan bakal makin moncer setelah jalan tol beroperasi. Dia berharap agar eskalasi bisnis semakin terasa jika ruas jalan tol dari Bakauheni hingga Palembang tersambung.

“Efeknya lumayan karena itu memudahkan transportasi dan logistik. Sekarang pertumbuhan perusahaan logistik sangat pesat, perusahaan-perusahaan kargo itu banyak menyerap produk kita se-

jalan tol bakal memacu arus transportasi, distribusi, dan logistik antara Bakauheni—Palembang. Jalan tol juga membuat konektivitas Sumbagsel dengan Jawa lebih cepat.

Dia menerangkan, dampak keberadaan jalan tol sudah mulai terasa di Lampung sejak jalan tol Bakter beroperasi, antara lain pertumbuhan penyaluran kredit dan pengimpunan dana di Kantor Cabang Metro dan Kantor Cabang Tanjung Karang. “Jadi *multiplier effect* sudah timbul karena transportasi jadi lebih cepat.” jelasnya kepada *Bisnis*. ▣

5 JAM SAMPAI PALEMBANG



Secara keseluruhan ada delapan kabupaten di dua provinsi yang dilintasi tiga ruas tol dari Bakauheni ke Palembang. Pada Oktober, ketiga ruas tol ditargetkan sudah beroperasi komersial dan memangkas waktu tempuh dari Bakauheni ke Palembang menjadi 5 Jam.



Sumber: BPJT, diolah

Bisnis/Erlangga Adiputra

Judul	Sejuta Rumah Masih Sesuai Target	Tanggal	Sabtu, 14 September 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 10		
Resume	Kementerian PUPR menyatakan realisasi Program Sejuta Rumah bulan ini telah mencapai 894.000 unit atau 71,52% dari target 1,25 juta unit		

► PROGRAM PEMBANGUNAN HUNIAN

Sejuta Rumah Masih Sesuai Target

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) bulan ini telah mencapai 894.000 unit atau 71,52% dari target 1,25 juta unit.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid optimistis target 1,25 juta rumah bisa tercapai pada akhir tahun. Dia menyebutkan, saat ini PSR sudah mencapai sekitar 894.000 unit rumah.

"Kami optimistis bisa capai 1,25 juta unit, apalagi kalau dapat dorongan dari asosiasi juga, bisa dipercepat," kata Khalawi di sela-sela Kongres Real Estat Asia Pasifik (APREC), Jumat (13/9).

Menurut data Kementerian PUPR, perincian pembangunan rumah tersebut antara lain 189.614 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mencapai 72% atau 651.218 unit

dari seluruh yang sudah terbagun.

Kemudian, 10.582 unit rumah telah dibangun oleh kementerian/ kembaga, 966 unit oleh pemerintah daerah, 446.943 unit oleh pengembang, dan 20 unit rumah lewat CSR, serta 3.093 unit rumah oleh masyarakat secara swadaya.

Untuk mempercepat peningkatan kepemilikan rumah oleh MBR, Khalawi mengimbau agar masyarakat tidak bergantung kepada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kuotanya sudah tipis.

Dia mengimbau masyarakat menggunakan bantuan subsidi lain seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang tahun ini penyerapannya masih nol.

"BP2BT itu kan bukan skema baru, sebenarnya ini lebih bagus dari FLPP, hanya masyarakat *enggak* sabar untuk mendapatkan manfaatnya," jelasnya.

Tahun ini, Khalawi menyebutkan target penyaluran BP2BT mencapai 20.000 unit. Kendati tersisa sekitar 3 bulan lagi, Khalawi yakin bisa terserap.

"Yang tahun ini kan baru mau *start*, karena ini berbasis tabungan kita harus cari bank yang kuat dan harus benar-benar diyakinkan. Konsumennya sendiri sudah ada, tinggal proses meyakinkan perbankannya itu," sambungnya.

President FIABCI Asia Pacific sekaligus Ketua DPP Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan, terus berdiskusi dengan Bank Dunia dan industri perbankan dalam mendorong pelaksanaan BP2BT.

"FIABCI bisa memberikan saran-saran dan kolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan masukan langsung atas minat bank dunia untuk membantu Indonesia."

(Mutiarra Nabila)

Judul	2 PPJ RUAs Tol Diamandemen	Tanggal	Senin, 16 September 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 7		
Resume	Perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Kunciran-Serpong dan Semanan-Sunter baru dilakukan amendemen terkait pengembalian dana talangan		

► PROYEK JALAN TOL

2 PPJT Ruas Tol Diamandemen

Bisnis, JAKARTA — Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dua ruas tol yakni Kunciran-Serpong dan Semanan-Sunter baru saja dilakukan amendemen terkait dengan pengembalian dana talangan yang semula berakhir pada Desember tahun ini menjadi Desember 2020.

Aprianus Doni Tolok
redaksi@bisnis.com

"Inti dari amendemen tersebut adalah pengunduran dana talangan dari dua ruas tol tersebut yang awalnya Desember tahun ini menjadi akhir tahun depan," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit kepada *Bisnis* pekan lalu.

Dalam catatan *Bisnis*, dana talangan pembangunan dua ruas tol tersebut adalah Rp530 miliar untuk ruas tol Semanan-Sunter dan Rp250,002 miliar untuk ruas tol Kunciran-Serpong.

Ruas tol Kunciran-Serpong sendiri direncanakan sudah mulai difungsikan pada akhir tahun ini. Tol sepanjang 11,14 kilometer ini merupakan bagian dari jaringan Jaringan Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2) yang menghubungkan bandara Soekarno-Hatta hingga Cibitung.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), segmen Semanan—Sunter terbagi menjadi Semanan—Grogol dan Grogol—Sunter dengan panjang tiap-tiap ruas 9,50 kilometer dan 12,40 kilometer.

dan perubahan tinggi konstruksi.

"Dua ruas tersebut adalah tahap satu dari enam ruas tol dalam kota Jakarta yaitu Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang. Amendemen berkaitan dengan perubahan desain konstruksi, karena adanya Peraturan Beban Gempa yang baru dan perubahan tinggi konstruksi, karena adanya perlintasan dengan LRT [Lintas Rel Terpadu] di Kelapa Gading," ujarnya kepada *Bisnis*.

Frans tidak menampik bahwa amendemen juga terkait dengan pengunduran pengembalian dana

talangan. Menurutnya, LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) masih memerlukan waktu, karena dilaksanakan dalam beberapa *batch*.

Adapun progres konstruksi Jalan Tol Kunciran-Serpong telah mencapai 97,02% hingga awal bulan ini. Sisa pekerjaan ruas tol ini adalah pengerjaan dua jembatan yakni Jembatan Bhayangkara Lama dan Jembatan Dua Bintaro.

Presiden Direktur PT Marga Trans Nusantara (MTN) Truly Nawangsasi mengatakan ruas tol yang menjadi bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2) terbagi dalam dua paket di mana paket satu yakni ruas Kunciran sampai Parigi telah selesai 95,39% dan paket 2 atau ruas Parigi hingga Serpong telah rampung sepenuhnya.

"Sisa 3% pekerjaan keseluruhan merupakan penyelesaian pekerjaan Jembatan Bhayangkara lama dan Jembatan Dua Bintaro yang ditargetkan rampung sebelum akhir

► Perubahan desain konstruksi tersebut terkait dengan adanya Peraturan Beban Gempa yang baru dan perubahan tinggi konstruksi.

September 2019. Jadi, target pengoperasian pada November 2019 dapat tercapai," tulisnya dalam pesan singkat kepada *Bisnis*.

Ruas Tol Kunciran-Serpong yang akan menghubungkan bandara Soekarno-Hatta hingga Cibitung dikelola oleh salah satu anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Marga Trans Nusantara (MTN) direncanakan sudah rampung pada akhir tahun ini.

Namun, karena mengalami beberapa kendala seperti pengunduran pengembalian dana talangan, tol sepanjang 11,14 kilometer ini harus mengalami amendemen PPJT selain ruas tol lain dari JORR 2 yakni Semanan-Sunter. ▣

Lelang PQ Tol Segera Diumumkan

Bisnis, JAKARTA — Pemenang tahap prakualifikasi lelang proyek jembatan tol Balikpapan—Penajam direncanakan diumumkan minggu depan.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR), Herwidiakto mengatakan bahwa Jembatan Tol Balikpapan—Penajam bulan ini akan diumumkan hasil *Pra Qualification*

mencapai Rp15,53 triliun. Kehadiran jembatan yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara ini diestimasi memangkas waktu tempuh menjadi sepuluh menit.

Herwi menambahkan bahwa masih banyak tahapan yang harus dilalui untuk bisa dimulai konstruksi proyek jembatan tol

yang amat besar karena mendapat keistimewaan, antara lain hak menyamakan penawaran atau *right to match*.

Di sisi lain, WTR belum memproyeksi perubahan asumsi trafik pada jembatan tol Balikpapan—Penajam. Pemandangan ibukota sebagaimana bakal diikuti pemindahan aparat sipil negara

Judul	Pembebasan Lahan Dipercepat	Tanggal	Senin, 16 September 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 9		
Resume	Pembebasan lahan ruas tol Manado-Bitung dikebut dengan mempercepat pembayaran ganti rugi, dan seluruh prosesnya ditargetkan rampung pada akhir Desember 2019.		

► TOL MANADO-BITUNG

Pembebasan Lahan Dipercepat

Bisnis, MANADO — Pembebasan lahan ruas tol Manado-Bitung dikebut dengan mempercepat pembayaran ganti rugi, dan seluruh prosesnya ditargetkan rampung pada akhir Desember 2019.

M. Nurhadi Pratomo
nurhadi.pratomo@bisnis.com

Triono Junoasmono, Kepala Balai Pelaksana Jalan (BPLN) Wilayah XV yang mencakup Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo—menjelaskan bahwa saat ini secara keseluruhan, atau dari total panjang ruas 39,9 kilometer (km), pembebasan lahan tol Manado-Bitung sudah mencapai 83%.

"Proses pembebasan secara umum masih berlangsung di daerah Bitung, Sulawesi Utara. [Pembebasan lahan] ditargetkan tuntas seluruhnya akhir Desember 2019," ujarnya kepada *Bisnis*, akhir pekan lalu.

Sebagai langkah percepatan, Triono menyebut pemerintah mempercepat pembayaran ganti rugi yang saat ini tengah diproses. Pihaknya mengklaim semua tahapan telah terencana, sehingga akan tuntas pada Desember 2019.

Seperti diketahui, jalan tol Manado-Bitung dikelola oleh salah satu anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT

► Saat ini secara keseluruhan, atau dari total panjang ruas 39,9 kilometer (km), pembebasan lahan tol Manado-Bitung sudah mencapai 83%.



Jasamarga Manado Bitung (JMB). JMB mengelola dua seksi di ruas tersebut yakni Seksi 2A Airmadidi-Danowudu sepanjang 11,50 km, dan Seksi 2B Danowudu-Bitung sepanjang 13,50 km.

Pada 9 Juni 2016, telah ditandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPTJ) ruas Manado-Bitung. Salah satu poin yang disepakati, yakni masa konsesi selama 40 tahun.

George M. Manuring, Direktur Utama Jasamarga Manado Bitung, menjelaskan bahwa progres pembangunan seksi 2A telah mencapai 90,60%. Adapun, pembebasan lahannya telah mencapai 99,86%.

Dengan demikian, lanjut dia, sisa pekerjaan 9,40% merupakan penyelesaian pekerjaan Simpang Susun Kauditan, kantor, dan gerbang tol. Pekerjaan itu ditargetkan dapat selesai pada akhir 2019.

George menyebut bahwa progres untuk seksi 2B sudah mencapai 27,48%. Progres pembebasan lahan untuk ruas tersebut telah mencapai 81,38%.

Secara detail, dia mengungkapkan bahwa sisa pekerjaan 72,52% keselu-

ruhan merupakan penyelesaian pekerjaan jembatan, *crossing*, *drainase*, *mainroad*, serta simpang Susun Danowudu. "[Sisa pekerjaan] ditargetkan dapat selesai pada 2020," jelasnya.

Dilansir dari situs resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP), proyek tol Manado-Bitung menelan investasi Rp5,12 triliun. Skema pendanaan proyek tersebut yakni kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). KPPPIP memuliskan bahwa kehadiran jalan tol Manado-Bitung

Sumber: Kementerian PUPR
www.pupr.go.id/infrastruktur/kegiatan

akan mendukung sektor pariwisata serta pertumbuhan ekonomi di Manado, Minahasa Utara, dan Bitung. Ruas tersebut juga akan menjadi akses utama ke kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung.

Dalam pemberitaan *Bisnis* sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Jenny Karouw mengatakan Bitung menjadi hub yang memfasilitasi ekspor dan impor. Dengan demikian, keberadaan tol akan memperlancar arus keluar masuknya barang maupun jasa.

Dia mencontohkan, industri unggulan seperti olahan kelapa

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
1. Tandatangani PPTJ : 9 Juni 2016

Pemegang Saham Badan Usaha
1. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (65%)
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (20%)
3. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (15%)

Data Teknis dan Investasi

1. Panjang	: 39,90 kilometer
2. Jumlah Seksi	: 2
3. Biaya Investasi	: Rp 5,12 triliun
4. Biaya Konstruksi	: Rp3,27 triliun
5. Biaya Tanah	: Rp0,81 triliun
6. Volume Lalu Lintas	: 12.376 kendaraan/hari (2019)
7. Operasi	: 2019
8. Masa Konsesi	: 40 tahun SPMK
9. SPMK	: -
10. Tarif (GoI)	: Rp 900/km (2019)
11. Dukungan Pemerintah	: Rp2,37 triliun
12. Besar Pengambilan Investasi Pemerintah	: Rp356,80 miliar (nilai 2015)

dan turunannya juga akan lebih mudah dikirimkan ke Bitung untuk diekspor. Artinya, distribusi barang akan menjadi lebih baik.

Di sisi lain, kebutuhan investor untuk mengurus perizinan seperti imigrasi akan terfasilitasi dengan adanya tol Manado-Bitung. Pasalnya, mereka akan lebih mudah mencapai tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang berada di Manado. ■

Judul	Investor Asing Mulai Incar Hunian MBR	Tanggal	Senin, 16 September 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 23		
Resume	Pasar perumahan yang besar di Indonesia telah mendorong pengusaha luar melirik penyediaan MBR		

► PENYEDIAAN RUMAH

Investor Asing Mulai Incar Hunian MBR

Mutiara Nabila
redaktor@bisnis.com

Pasar perumahan yang besar di Indonesia, termasuk sudah berjalannya program pemerintah yang khusus untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), membuat pengembang asing turut tertarik ekspansi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sudah memiliki program khusus untuk menyediakan rumah MBR dengan Program Sejuta Rumah (PSR) dengan target tahun ini sebanyak 1,25 juta rumah.

Adapun, hingga September tahun ini, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid menyebutkan PSR sudah tercapai 894.000 unit rumah.

Khalawi, mengutip Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa salah satu jalan mempercepat pembangunan perumahan untuk rakyat

dan mencapai target program sejuta rumah selain dari regulasi adalah dengan mencari pendanaan dan investasi dari investor asing.

"Pak Presiden meminta sebanyak-banyaknya investor [dari] dalam dan luar negeri. Dengan ada event seperti Aprec [Kongres Real Estat Asia Pasifik] bisa mendorong investor asing untuk melihat prospek di Indonesia," ungkap Khalawi di sela-sela Aprec, pekan lalu.

Khalawi menuturkan bahwa sudah banyak pengembang asing, seperti dari Korea Selatan, China, dan Malaysia yang berminat membangun rumah MBR ditambah dengan dukungan dari asosiasi Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI).

"Permintaan investasi di sektor rumah MBR ini cukup banyak, dan dari sisi regulasi sedang kita diskusikan dengan teman-teman asosiasi. Regulasinya banyak, khususnya perizinan," jelas Khalawi.

Perizinan juga difokuskan di daerah, karena percepatan perizinan di daerah dinilai lebih sulit akibat

masih dikelola oleh daerah sesuai dengan ketentuan otonomi.

KOLABORASI

Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata mengatakan dengan masuknya investor asing, diharapkan bisa terjadi kolaborasi dengan pengembang daerah, karena investor asing belum tentu bisa langsung masuk ke tengah masyarakat di Indonesia, apalagi untuk kalangan MBR.

"Mereka memang ahli di bidang teknologi, perencanaan, dari sisi keuangan, tetapi *local content* seperti kearifan lokal dan karakter *market* itu kan kita yang mengerti. Kan mereka tidak paham akan hal itu. Jadi saya kira perlu adanya kolaborasi antara investor asing dengan investor di Indonesia untuk saling menguatkan," ujarnya.

Pengembang asing, katanya, bisa mendapatkan rekanan yang tepat bisa datang ke asosiasi. Dengan begitu, asosiasi bisa menilai apa kebutuhan pengembang asingnya. Misalnya, kebutuhan lokasinya,

agar dicarikan pengembang dan investor lokal yang cocok dengan visi misinya.

Selain itu, Eman, sapaan Ketua Umum DPP REI sekaligus Presiden Federasi Real Estat Dunia (FIABCI) Asia Pasifik, mengatakan bahwa dengan kolaborasi tersebut juga membuka kesempatan bagi pengembang asing untuk belajar mengembangkan rumah untuk MBR di negaranya atau di negara-negara ketiga lainnya.

"Di Asia Pasifik mereka belum banyak punya program rumah rakyat oleh swasta, padahal di negara ketiga, pemerintah tidak punya cukup uang untuk membangun seluruh rumah rakyat. Nah, bagaimana swasta bisa ikut berpartisipasi? Dengan membuat skema kebijakan, skema keuangan yang bisa dijalankan oleh swasta."

Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin meminta agar regulasi dari pemerintah terkait dengan masuknya investasi pengembang asing di Indonesia tak terlalu ber-

belit dan menyulitkan.

"Negara jangan berlebihan mengatur. Dengan meminta untuk kerja sama dengan pengembang lokal dan dengan rencana pengembangan yang tepat saja sudah cukup. Intinya yang masuk ke sini *joint venture*," kata Rusmin.

Menurut Rusmin, pengembang asing memiliki kecenderungan untuk tertarik pada pengembangan skala kota. Namun, dengan pasar perumahan murah yang besar, pengembang asing bisa mulai dari sana dulu.

"Pasar kita besar makanya mereka tertarik, apalagi ada isu-isu pindah ibu kota, itu kan membuka pasar lebih besar lagi. Intinya bagaimana ada mekanisme hukum yang jelas, tidak berbelit," jelas Rusmin.

Untuk menentukan siapa pengembang yang cocok untuk bekerja sama, pengembang asing bisa mencarinya melalui bantuan asosiasi pengembang lokal, yang mengetahui betul kondisi pengembangan di lapangan.

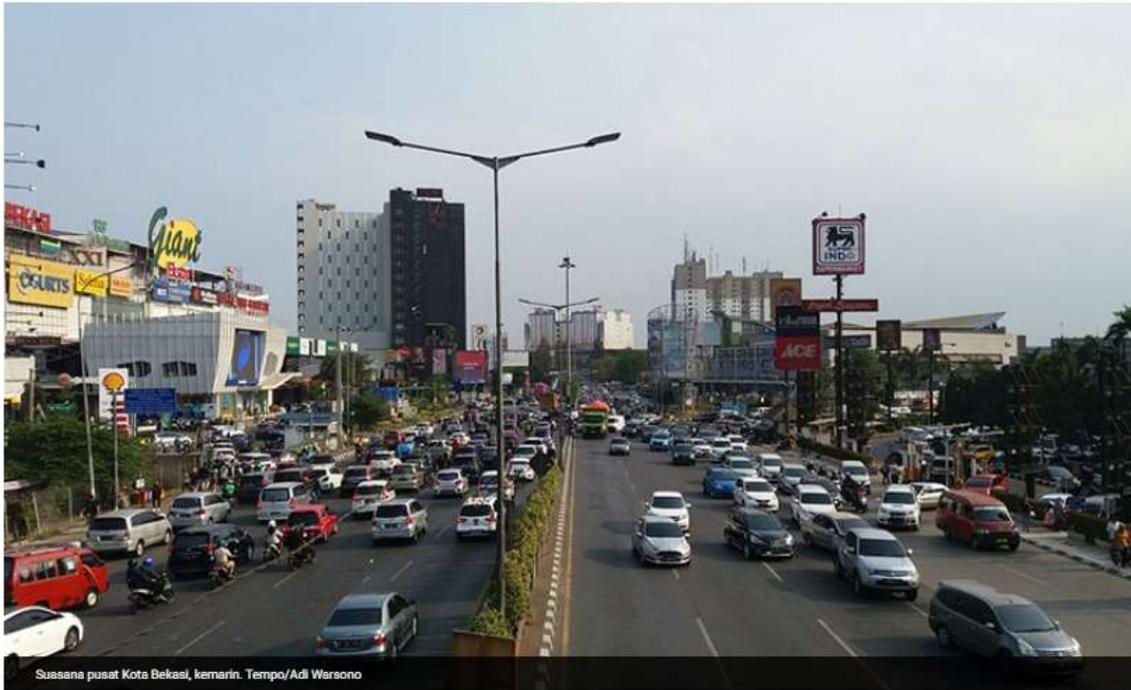
Judul	Kota Bekasi Waspada Ledakan Jumlah Penduduk	Tanggal	Senin, 16 September 2019
Media	Koran Tempo, Hal.Metro 1		
Resume	Dari tingginya jumlah angka urbanisasi		

METRO

Kota Bekasi Waspada Ledakan Jumlah Penduduk

Urbanisasi menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bekasi.

EDISI, 16 SEPTEMBER 2019



Suasana pusat Kota Bekasi, kemarin. Tempo/Adi Warsono

BEKASI – Kepadatan penduduk di Kota Bekasi terus bertambah. Angkanya saat ini sudah mencapai 16.500 jiwa per kilometer persegi dari total luas wilayah sekitar 210 ribu kilometer persegi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut Kota Bekasi menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kota Surabaya.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan faktor urbanisasi menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi. Tahun ini tercatat jumlah penduduk Bekasi sudah menembus angka 3,2 juta jiwa. Jumlah itu akan terus bertambah dan diperkirakan mencapai 3,7 juta jiwa pada 2023.

"Pertumbuhan jumlah penduduk dari angka kelahiran cuma dua koma sekian persen," katanya. "Sedangkan dari urbanisasi, luar biasa tingginya."

Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Djikron, menuturkan pertumbuhan jumlah penduduk itu berdampak pada munculnya permukiman liar. Sebab, banyak pendatang memanfaatkan lahan ilegal sebagai tempat tinggal, yang sebagian besar berada di lahan pengairan. "Awalnya mereka membangun semi-permanen, tapi lama-lama menjadi permanen," kata dia.

Penertiban permukiman liar yang dilakukan pemerintah saat ini baru sebatas kebutuhan lahan karena terbentur penyediaan tempat relokasi atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pemerintah berencana membangun tiga blok rusunawa di Bantargebang pada 2020 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Sekarang kami mulai memproteksi lahan-lahan pemerintah supaya tidak menjadi permukiman liar," kata dia.

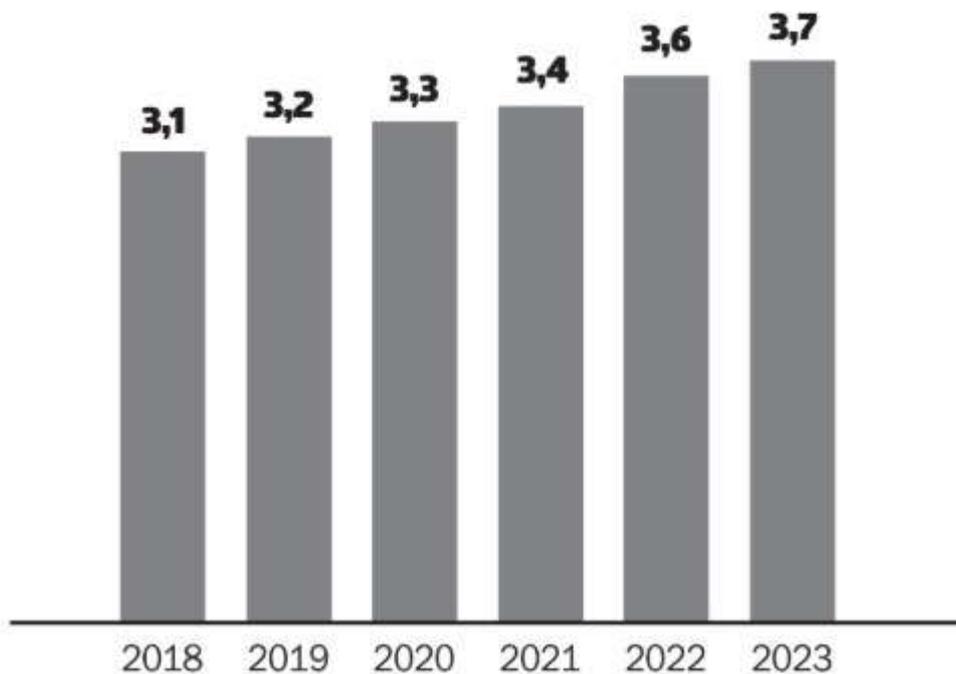
Menurut Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi, Erwin Gwinda, dalam penetapan tata ruang, pemerintah telah memetakan wilayah dalam tiga kategori, yaitu kepadatan tinggi, sedang, dan rendah. "Ini sebagai rujukan pengembangan hunian bagi pengembang dan melindungi ruang terbuka hijau," kata dia.

Wilayah yang masuk kategori kepadatan tinggi adalah pusat kota Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Bekasi Barat. Di sana direkomendasikan untuk dibuat hunian vertikal. Sedangkan hunian tapak direkomendasikan di lokasi dengan tingkat kepadatan rendah, seperti Mustikajaya, Jatisampurna, Jatiasih, Rawalumbu, serta sebagian Medansatria dan Bekasi Utara. "Jadi, sebaran penduduk bisa lebih merata," ucap Erwin.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, mengatakan kawasan kumuh di Kota Bekasi tersebar di 112 titik dengan luas total mencapai 445 hektare. Jumhana menargetkan penataan kawasan kumuh rampung selama lima tahun. "Tahun ini kami menyiapkan dana Rp 14 miliar untuk menata 111 hektare kawasan kumuh tersebar di tujuh kelurahan," katanya.

Pengamat tata kota dari Universitas Tri Sakti, Yayat Supriatna, mengatakan wilayah Bekasi secara umum telah menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Faktor itulah yang menjadi daya tarik utama bagi para pendatang. Karena itu, bisa dimaklumi jika tingkat kepadatan penduduk di Kota Bekasi melonjak dengan cepat. Apalagi kota ini dekat dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat bisnis di Indonesia. "Tantangannya adalah bagaimana bisa mengelolanya agar keberlanjutan, sehingga tidak merusak lingkungan," kata Yayat. **ADI WARSONO | SUSENO**

Jumlah Penduduk Kota Bekasi dan Proyeksinya (Juta):



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2018-2023.

Judul	TNI Dilibatkan dalam Pengelolaan Sungai di Jabotabek	Tanggal	Senin, 16 September 2019
Media	Koran Tempo, Hal.Metro 3		
Resume	Pemerintah akan mengelola sungai yang melintasi kawasan ibukota		

METRO

TNI Dilibatkan dalam Pengelolaan Sungai di Jabotabek

Proyek penanganan banjir dilanjutkan setelah polemik program normalisasi dan naturalisasi berakhir.

EDISI, 16 SEPTEMBER 2019



JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Kodam Jaya Tentara Nasional Indonesia untuk menjalankan program pemeliharaan enam sungai dan lima situ di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Menurut Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, banjir di Jabotabek tak bisa ditangani hanya dengan pembangunan fisik melalui naturalisasi dan normalisasi.

Basoeki menilai keterlibatan masyarakat dalam penanganan banjir sangat penting. Karena itu, pemerintah harus menggerakkan kegiatan non-struktural agar masyarakat berperan aktif. "Ini untuk memaksimalkan fungsi sungai dan situ sebagai pengendali banjir dan tampungan air," kata dia, pekan lalu.

Kepala Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR, Bambang Hidayah, mengatakan enam sungai yang menjadi fokus kerja sama dengan Kodam Jaya adalah Sungai Ciliwung, Mookervart, Pesanggrahan, Bekasi, Blencong, dan Sungai Cikeas. Sedangkan untuk situ ialah Situ Sidomukti, Rawa Lumbu, Pasir Gadung, Parigi dan Situ Leungsir.

Menurut Bambang, semua sungai dan situ tersebut telah mengalami pendangkalan akibat penumpukan sampah. Sebagian besar sampah berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kondisi itu diperparah oleh berdirinya bangunan di bantaran sungai atau situ. Dia berharap pelibatan TNI dalam pengelolaan dapat memulihkan fungsi sungai dan situ.

Untuk pembangunan fisik, kata Bambang, Kementerian PUPR telah memasukkan kembali proyek normalisasi Sungai Ciliwung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek yang dimulai pada 2013 ini sempat terhenti pada 2017, setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta sempat berpolemik soal cara menata 13 sungai yang mengalir di Ibu Kota sebagai langkah penanganan banjir. Kementerian PUPR berniat terus melanjutkan program normalisasi dengan membangun dinding beton di sepanjang badan sungai. Sedangkan Anies mengusung program naturalisasi dengan membangun dinding sungai menggunakan batu kali dan pohon.

Bersamaan dengan munculnya polemik itu, pemerintah Jakarta menghentikan pembebasan lahan bantaran sungai sepanjang 17,5 kilometer. Karena itu, Kementerian PUPR tak lagi mengajukan anggaran normalisasi untuk APBN 2019.

Menurut Bambang, sekarang pemerintah Jakarta dan pusat telah sepakat melanjutkan proyek penanganan banjir. Program naturalisasi dan normalisasi akan dikombinasikan untuk memulihkan sungai-sungai di Ibu Kota. "Proyek normalisasi sepanjang 1,5 kilometer di Kelurahan Pejaten Timur anggarannya Rp 26 miliar, akan terealisasi tahun 2020," ujarnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan lembaganya tengah menyelesaikan pembebasan lahan 118 bidang tanah di empat kelurahan sebelum akhir 2019. Program penanganan banjir di Sungai Ciliwung sudah bisa dilanjutkan sesuai pembayaran ganti rugi kepada para pemilik bidang tanah yang sah. "Oktober mungkin sudah mulai pembebasan lahan," ucapnya.

Panglima Daerah Militer Jaya, Mayor Jenderal Eko Margiyono, mengatakan TNI siap membantu kegiatan pemeliharaan sungai dan situ di Jabotabek. Karena itu, TNI berencana merangkul lembaga swadaya masyarakat dan komunitas pencinta lingkungan hidup untuk turut ambil bagian.

Selain itu, menurut dia, TNI akan membantu Kementerian PUPR dalam pengerjaan penggalian sedimen di dasar sungai dan situ. Penggalian sedimen dengan alat ekskavator yang dimulai 12 September lalu itu diprediksi rampung dalam 90 hari. "Selain melakukan perbaikan kualitas (penggalian sedimen), kami akan mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke situ dan sungai," tuturnya. **IMAM HAMDI | FRANCISCO ROSARIANS**

Memulihkan Sungai

PEMERINTAH Jakarta dan pusat akan melanjutkan program penanganan banjir dengan memulihkan sungai yang melintasi Ibu Kota. Salah satunya adalah program normalisasi dan naturalisasi di Sungai Ciliwung. Targetnya, badan Sungai Ciliwung akan kembali memiliki lebar 40-60 meter dari kondisi saat ini yang hanya 12-15 meter.

Penanganan Banjir di Sungai Ciliwung-Cisadane

- » **Panjang:** 33,5 kilometer
- » **Selesai:** 16 kilometer
- » **Kelurahan Gedong:** 23 bidang tanah seluas 1,6 hektare
- » **Kelurahan Balekambang:** 45 bidang tanah seluas 3,7 hektare
- » **Kelurahan Cililitan:** 14 bidang tanah seluas 4,7 ribu meter persegi
- » **Kelurahan Cawang:** 15 bidang tanah seluas 4,8 ribu meter persegi
- » **Kelurahan Kampung Melayu:** 10 bidang tanah seluas 1,3 ribu meter persegi
- » **Kelurahan Tanjung Barat:** 11 bidang tanah seluas 3,8 ribu meter persegi
- » **Kelurahan Pejaten Timur:** 152 bidang tanah seluas 7,1 hektare
- » **Kelurahan Bukit Duri:** satu bidang tanah seluas 75 meter persegi
- » **Belum selesai:** 17,5 kilometer

TEMPO/GUNAWAN WICAKSONO



Pembuatan turap pada proyek normalisasi Kali Grogol di kawasan Palmerah, Jakarta, November 2018.

Pembiayaan

■ Pemerintah DKI Jakarta

APBD 2019: Rp 160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tanah di Kelurahan Pejaten Timur, Cililitan, Tanjung Barat, dan Balekambang

Rencana APBD 2020: Rp 600 miliar

Biaya pembebasan lahan lanjutan di Sungai Ciliwung
Biaya pembebasan lahan di tepi Sungai Pesanggrahan
Biaya pembebasan lahan di beberapa waduk

■ Pemerintah Pusat

Rencana APBN 2020: Rp 26 miliar

Biaya normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 1,5 kilometer di Pejaten Timur